

DAKWAH DALAM KONDISI KONFLIK PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI

Ahmad Supriyadi
Dosen STAIN Kudus

Abstrak

Dakwah merupakan panggilan setiap orang Islam karena telah diperintahkan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an memandang bahwa ucapan yang terbaik adalah ucapan yang menyeru kepada Allah, beramal shaleh, mengatakan yang haq dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kegiatan tersebut tidaklah mudah untuk mencapai tujuan. Supaya dakwah mampu mencapai pada sasaran dan tujuan, seorang da'i perlu menguasai ilmu tentang kemasyarakatan atau sosiologi, sebab yang menjadi sasaran dakwah adalah masyarakat dalam kondisi konflik, karena itu diperlukan pendekatan teori sosiologi untuk menganalisis. Para ahli telah membangun dua teori dalam melihat fenomena masyarakat yaitu teori konflik dialektik dan fungsional konflik. Bagaimana langkah dakwah dalam kondisi konflik perspektif teori sosiologi? Lewis A. Coser dan Ralp Dahrendorf yang mencetuskan teori konflik fungsional dan konflik dialektik mengatakan bahwa masyarakat itu berwajah dua, disatu sisi ada keteraturan dalam masyarakat melalui berjalannya masing-masing fungsi dalam suatu masyarakat, tetapi di sisi lain juga terdapat konflik dalam suatu masyarakat, karena itu dakwah dalam teori konflik fungsional dan konflik dialektik merupakan dua teori yang sama-sama menekankan pada objek bahwa dalam suatu masyarakat terdapat konflik. Peranan teori-teori tersebut dalam aktifitas dakwah bagi umat Islam adalah sebagai pijakan yang mampu mempengaruhi materi dalam menyampaikan pesan dalam berdakwah dan sekaligus merupakan obyek kajian dalam berdakwah. Materi dakwah di

daerah dalam kondisi konflik lebih menekankan pengaktifan fungsi-fungsi sosial sehingga konflik bisa selesai, sedangkan masyarakat yang sedang konflik perlu pemahaman-pemahaman tentang kebersamaan, ketentraman dan perdamaian, sehingga obyek kajian yang selalu disampaikan lebih menekankan hal itu.

Katakunci:

A. Pendahuluan

Daerah konflik sejatinya belum banyak mengetahui tentang arti perdamaian, ketentraman dan kebersamaan. Pendakwah mempunyai kewajiban untuk menjelaskan apa itu perdamaian, apa itu ketentraman dan apa itu kebersamaan. Perdamaian merupakan kekuatan yang menjadi modal utama dalam mempertahankan kedaulatan suatu masyarakat bahkan sebagai benteng yang sulit untuk ditembus dengan serangan apapun.

Pengertian konflik pada teori ini bukanlah konflik konfrontasi yang lebih dekat dengan anarkhis, tetapi maksud konflik disini yaitu konflik kepentingan dan tujuan. Teori fungsional konflik dan teori konflik dialektik dibangun oleh tokoh sosiolog yang terkemuka. Pemikiran awal tentang fungsi konflik sosial berasal dari George Simmel, tetapi diperluas oleh Lewis A. Coser (Jaworski, Gary Dean, 1991: 116-123), sedangkan teori konflik dialektik di bangun oleh Ralp Dahrendorf.

Teori fungsional konflik menurut Lewis A. Coser bahwa konflik mempunyai fungsi menggerakkan ikatan-ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau konflik dengan masyarakat lain, akan dapat menambah kuat integrasi kelompok tersebut, begitu pula sebaliknya masyarakat yang tidak ada konflik dengan masyarakat lain akan cenderung kurang kuat integrasinya pada kelompok atau masyarakat. Coser memberikan contoh bahwa kebijakan kesatuan masyarakat Yahudi Israel menghadapkan dirinya dalam konflik di Timur Tengah. Kemungkinan jika konflik dengan Timur Tengah itu berakhir, maka justru akan dapat memperburuk integrasi bangsa Yahudi Israel.

Sedangkan teori konflik dialektik di bangun oleh Ralp Dahrendorf. Teori ini tidak sepakat dengan teori fungsionalisme struktural yang mengatakan bahwa masyarakat itu selalu berada dalam kondisi keseimbangan. R. Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan atau konflik terus menerus di antara unsur-unsurnya.

Berdasarkan dua tokoh sosiolog yang membangun teori ini antara fungsional konflik dengan konflik dialektik tentu memiliki nilai fungsi dalam berdakwah bagi ummat Islam.

Penulis punya pandangan bahwa hasil penelitian kedua tokoh sosiolog ini punya kontribusi positif terhadap kegiatan dakwah yang dilakukan oleh ummat Islam. Dakwah bagi ummat Islam merupakan satu kegiatan yang wajib di lakukan oleh siapapun, karena Islam telah mendeklarasikan dirinya sebagai agama dakwah.

Bila kita ambil satu intisari dari kandungan al-Qur'an bahwa Allah menghendaki adanya perbedaan pada tatanan masyarakat "jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu" (Q.S.11:Huud:118). Ayat ini memberikan petunjuk pada setiap umat Islam khususnya para da'i, bahwa Allah membuat sistem sosial yang berbeda-beda dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda pula dalam menyampaikan dakwah kepada mereka. Supaya pembahasan kedua teori ini lebih jelas dan utuh, tidak terpisah-pisah, maka perlu penulis ulas kedua teori itu satu persatu kemudian menelaah secara kritis atas teori tersebut korelasinya dengan dakwah di dalam kondisi konflik.

B. Pembahasan

1. Teori Konflik Dialektik

Teori konflik dialektik merupakan pertentangan antara teori fungsionalisme struktural yang dibangun oleh Robert K. Merton dengan teori konflik yang di bangun oleh Ralp Dahrendorf. Apa yang menjadi pertentangan? menurut teori fungsionalisme struktural, bahwa masyarakat sebagai organisasi kelompok selalu dalam kondisi teratur. Masyarakat yang teratur itu berarti bergerak selalu menuju keseimbangan. Sedangkan teori konflik berpandangan sebaliknya,

bahwa masyarakat selalu dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan terus menerus diantara unsur-unsurnya.

Menurut teori fungsionalisme struktural, setiap elemen atau setiap institusi berfungsi dan memberikan dukungan terhadap stabilitas sosial. Adapun teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Teori fungsional struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (George Ritzer, 1980:26).

Dahrendorf juga meringkas asumsi yang kontradiksi antara yang dibangun oleh teori fungsional dengan teori konflik :

a. Teori fungsional :

1. Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang secara relatif mantap dan stabil.
2. Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang terintegrasi dengan baik.
3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat mempunyai fungsi, yakni memberikan sumbangan pada bertahannya masyarakat itu sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya.

e. Teori konflik :

1. Setiap masyarakat pasti tunduk pada proses perubahan, bahwa perubahan sosial ada di mana-mana.
2. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik, bahwa konflik sosial ada di mana-mana.
3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.
4. Setiap masyarakat di dasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Supaya lebih jelas dalam memahami adanya bentuk-bentuk konflik, perlu dijelaskan adanya unsur-unsur dasar konflik di bawah ini.

1. Konsep Wewenang dan Posisi Konflik Masyarakat
a. **Konsep Wewenang dan Posisi dalam Teori Ralp Dahrendorf**

Ralp Dahrendorf melandasi pemikiran konflik dari Konsep wewenang dan posisi. Konsep ini dari sebuah fakta bahwa di dalam sosial masyarakat terdapat kekuasaan yang diperankan oleh orang-orang yang memang menduduki kekuasaan, dan juga ada orang-orang yang menduduki posisi bawahan sebagai orang yang selalu di atur oleh penguasa. Keduanya merupakan fakta sosial.

Inti tesisnya bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata sebagai faktor pemicu lahirnya sebuah konflik secara sistematis. Pada saat kekuasaan itu selalu diperankan oleh seorang saja tanpa adanya pemindahan kekuasaan, sering sekali hal itu memicu satu konflik di kalangan masyarakat. Begitu pula wewenang yang dimiliki oleh seorang penguasa, apabila wewenang sepenuhnya hanya dikuasai oleh seorang an-sich, maka hal itu akan memicu konflik di kalangan masyarakat.

Perlu diperhatikan bahwa perbedaan kekuasaan akan melahirkan perbedaan wewenang dan juga menjadikan individu pada perbedaan posisi dalam masyarakat. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan atau pada posisi bawah dalam setiap struktur sosial. Setiap individu yang tidak taat pada wewenang, akan kena sanksi, karena wewenang yang diberikan pada seseorang itu legal. Karena itu Ralp Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat adalah persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*impertively coordianted associations*).

Sedangkan kekuasaan akan selalu memisahkan antara penguasa dan yang dikuasai, karena itu dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan yang nyata, padahal kepentingan masing-masing golongan antara satu dengan lainnya terjadi perbedaan.

Contoh dalam suatu kepemimpinan di masyarakat, pertentangan antara golongan yang berkuasa atau memimpin

dengan golongan yang tidak punya kekuasaan atau dipimpin. Golongan yang berkuasa berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan status-quo sedangkan golongan yang dikuasai selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan antar golongan pro status-quo dengan yang menolak selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur.

Kepentingan yang terdapat dalam kelompok berkuasa selalu dinilai obyektif oleh kelompok yang berkuasa dan sebaliknya kepentingan kelompok yang dikuasai juga dipandang obyektif oleh kelompok tersebut. Karena itu kekuasaan yang legal akan selalu berada dalam keadaan terancam dari golongan yang anti status-quo.

Sedangkan seorang individu dalam kelompok, akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik, seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu.

Menurut Ralp Dahrendorf kekuasaan (*authority*) pasti membahas hubungan antara atasan dengan bawahan. Hubungan antara atasan dengan bawahan selalu menimbulkan konflik yang akan melahirkan kelas baru. Terdapat dikotomi antara mereka yang berkuasa dengan yang dikuasai bahwa beberapa orang masuk dalam struktur kekuasaan dan beberapa golongan lagi masuk dalam struktur orang-orang yang dalam penguasaan (Dahrendorf,1959:173 dalam sosiologi kontemporer, 2004:134). Ia mengakui adanya perbedaan antara mereka yang memiliki sedikit kekuasaan dengan mereka yang memiliki banyak kekuasaan. Perbedaan dalam tingkat dominasi itu dapat dan selalu sangat besar, tetapi pada dasarnya dalam masyarakat terdapat dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan atau sebagai penguasa dan mereka yang tidak berpartisipasi sebagai kelompok bawahan. Sedang kedua kelompok itu selalu dalam pertentangan. Maka setiap kelompok atau asosiasi yang dalam pertentangan akan muncul suatu ketegangan di antara mereka, baik yang masuk

dalam struktur kekuasaan dan yang masuk dalam struktur penguasaan.

b. Kegunaan Teori Konsep wewenang dan Posisi dalam dakwah

Berdasarkan pengamatan Ahmad Syafi'i Ma'arif (1995:102) bahwa budaya integrasi kelompok merupakan sebuah gejala masyarakat yang mengandung arti:

Pertama, gejala itu mungkin sebagai salah satu manifestasi dari kesadaran sejarah umat yang semakin dewasa dalam menilai perjuangan masa lampau yang lebih dominan pada orientasi budaya golongan, tapi banyak membuahkan kegagalan, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Hal ini akan menguras energi yang terlalu banyak tetapi tidak mendatangkan manfaat atau hasil yang signifikan. Sehingga tenaga habis untuk membenahi konflik-konflik internal dalam dirinya selama beberapa tahun.

Konflik dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat pasti terjadi, tetapi Islam mengajarkan suatu konflik ada pada dataran *fastabiqul kboiraat*, dan bukanlah konflik internal yang justru dapat melunturkan *ukhawah islamiyah*.

Kedua, rasa simpati terhadap semakin melemahnya orientasi golongan dapat dipahami sebagai suatu protes damai dari generasi muda, khususnya yang cerdas dan kontemplatif. Dalam perspektif ini, suatu rekonstruksi total terhadap kehidupan umat tidaklah mungkin efektif bila pondasinya ditegakkan atas pemahaman yang parsial.

Teori tersebut dapat di jadikan pijakan dalam berdakwah posisinya sebagai pengetahuan yang mampu mempengaruhi materi yang akan disampaikan kalau ia sebagai da'i penceramah. Tetapi bila ia sebagai pemimpin yang memegang wewenang, dakwah bagi dia adalah memberikan keteladanan dalam memimpin bawahan secara baik yang membawa kemaslahatan dan *rahmatan lilalamin* dan bukan sebaliknya membawa pada perselisihan yang tajam dan membawa *madharat*. Kemampuan seperti ini banyak

dipengaruhi oleh tingkat intelektual dan emosional spiritual dalam menyampaikan pesan-pesan bagi masyarakat.

1.1. Pertentangan kelompok semu dan kelompok kepentingan

Kedua kelompok ini mengandung sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud kelompok semu dan kelompok kepentingan?

Dahrendorf membagi kelompok yang terlibat konflik dalam dua tipe, yaitu kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*).

Kepentingan yang dimaksudkan oleh Dahrendorf adalah bersifat manifes (disadari) atau laten (kepentingan potensial). Kepentingan laten adalah tingkah laku potensial (*undercurrent behavior*) yang telah ditentukan bagi seseorang karena ia menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari. Jadi orang yang masuk dalam anggota pada suatu kelas yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi sebagai kelompok, mereka tidak menyadari kekurangannya (Dahrendorf,1959:173 dalam Sosiologi Kontemporer,2004:134). Contoh: kelompok kulit hitam, wanita. Kelompok ini pada mulanya tidak menyadari suatu kepentingan, dan kemudian kepentingan itu muncul di permukaan dalam bentuk tujuan-tujuan yang disadari, misalnya persamaan gaji, persamaan kesempatan kerja dan sebagainya.

Sebelum tahun 1960-an sebagian besar wanita merupakan kelompok semu yang ditolak oleh kekuasaan di sebagian struktur sosial di mana mereka berpartisipasi. Sedangkan pada pertengahan tahun 1960-an berbagai kepentingan laten kaum perempuan itu muncul ke permukaan atau disadari, yang kemudian diikuti oleh perkembangan kelompok yang memperjuangkan kebebasan wanita. Jadi pertentangan antara kaum pria yang menduduki kekuasaan dan kaum wanita yang dikuasai atau diatur, diredakan lewat organisasi struktural. Pertentangan yang telah berakar dan potensial diantara kedua jenis kelamin ini sekarang diatur lewat institusional.

Berdasarkan konflik antara lelaki dan wanita di atas, kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang

kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Pertentangan ini dalam Islam dianggap tidak ada dan tidak diperbolehkan, tetapi fakta sosial telah menunjukkan umat Islam, bahwa konflik ini pasti ada dalam masyarakat. Pendakwah haruslah cukup berhati-hati dalam menyampaikan suatu pesan Islam kepada mereka, karena sejatinya mereka ada dua konflik yang selalu ada dan hidup di lingkungan mereka.

1.2. Konsekuensi Konflik Menimbulkan Perubahan Struktural

Salah satu fungsi atau konsekuensi konflik adalah menimbulkan perubahan pada struktur sosial. Dahrendorf (Doyle Paul Johnson, 1981:192) membedakan perubahan struktural dalam tiga tipe :

- a. Perubahan keseluruhan personel di dalam posisi dominasi;
- b. Perubahan sebagian personel dalam posisi dominasi;
- c. Digabungkannya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa.

2. Teori Fungsional Konflik

Teori fungsional konflik dibangun oleh Lewis A. Coser dalam karyanya yang berjudul *"The Function Of Social Conflict"*. Ia mengatakan bahwa kedua teori fungsional dengan teori konflik dimungkinkan untuk disatukan. Kebanyakan para ahli sosiolog ketika telah terikat pada satu teori, ia berpegang teguh pada teori tersebut. Sedangkan Coser telah terikat dua puluh tahun lebih pada bahasan struktur sosial dan sekarang ia menunjukkan bahwa model tersebut selalu mengabaikan studi tentang konflik sosial, padahal dalam realitas, konflik sosial itu memang ada dalam sebuah masyarakat.

Coser mengkritik para ahli teori dengan kritikan bahwa Albion Small dan George E. Vincen sebagai pengarang buku teks pertama sosiologi Amerika yang melakukan orientasi pembaharuan sosiologi, misalnya ketika menulis “Sosiologi dilahirkan dalam semangat modern untuk memperbaiki masyarakat) (Coser, 1956:17). Akan tetapi para ahli sosiologi kontemporer sering mengabaikan analisa konflik sosial, secara implisit melihatnya sebagai destruktif atau patologis bagi kelompok sosial. Coser memilih menunjukkan berbagai sumbangan yang berarti pada konflik yang secara potensial positif untuk membentuk serta mempertahankan struktur. Dia melakukan hal ini dengan membangun pertanyaan-pertanyaan klasik yang berhubungan dengan konflik sosial.

Coser hampir sama dengan George Simmel yang tidak pernah berusaha menghasilkan teori sosiologi yang holistik. Karena usaha untuk menghasilkan teori sosiologi yang holistik adalah prematur.

Coser mengambil pembahasan konflik dari Simmel. Ia mengembangkan proposisi dan memperluas konsep Simmel dalam menggambarkan kondisi-kondisi dimana konflik secara positif membantu struktur sosial dan bila terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. Preposisi Simmel bahwa konflik merupakan bentuk interaksi di mana ada tempat, waktu, intensitas dan lain sebagainya yang tunduk pada perubahan sebagaimana sisi segi tiga yang dapat berubah.

Perhatian Coser secara umum ialah memperlihatkan bahwa konflik tidak harus merusak atau bersifat disfungsional untuk sistem di mana konflik itu terjadi, akan tetapi konflik itu justru mempunyai dampak positif atau menguntungkan sistem itu.

1. Konflik Antar Kelompok Dan Solidaritas Kelompok (Doyle Paul Johnson, terjemahan,1990:197)

Teori fungsionalisme konflik dapat dijelaskan melalui konflik antara kelompok dalam (*in-group*) dengan kelompok luar (*out-group*). Bahwa solidaritas internal dan integrasi kelompok (*in-group*) bertambah tinggi karena adanya tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar (*in-group*) semakin besar. Kekompakan yang semakin tinggi dari suatu kelompok yang terlibat dalam konflik akan membantu memperkuat batas antara kelompok itu dan

kelompok-kelompok lainnya dalam sebuah sistem masyarakat. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi yang disebabkan karena perpecahan dan pengelompokan. Kelompok yang bersebrangan atau menyimpang tidak akan ditolerir, mereka mungkin akan diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat atau bisa jadi dibujuk supaya mau masuk di jalan kelompok mereka.

Fungsi konflik yang berasal dari eksternal bisa untuk memperkuat kekompakan internal dan meningkatkan moral kelompok, sehingga kelompok-kelompok (atau pemimpin kelompok) dapat berusaha memancing antagonisme dengan kelompok luar atau menciptakan musuh dengan orang luar supaya mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal. Hal ini tidak perlu harus merupakan suatu proses yang di sadari seperti yang di pahami oleh Dahrendorf.

Apapun bentuk dan sumbernya bahwa ancaman dari luar itu membantu meningkatkan atau mempertahankan solidaritas internal. Bahkan kalau ancaman itu hanya khayalan belaka, musuh itu masih sangat berfungsi bagi kelompok itu sebagai kambing hitam. Maka sesungguhnya ketegangan dalam suatu kelompok dapat dihindarkan untuk tidak merusak kelompok itu, apabila ketegangan itu dapat diproyeksikan kesuatu kelompok lain yang ada di luar.

Hubungan antara kelompok dengan musuh dari luar akan berbeda-beda menurut suasananya. Bisa jadi hubungan antara kelompok dalam (*in-group*) dengan bakal musuh sangat minim dan sifat-sifat kelompok yang dimilikipun bisa jadi berbeda atau sebaliknya. Dalam hal ini bakal musuh itu hanya merupakan suatu ancaman yang selalu ada.

Contoh konflik antara kelompok dalam (*in-group*) dengan kelompok luar (*out-group*): perang antar bangsa sering merangsang nasionalisme yang tinggi dan semangat patriotik, khususnya kalau ancaman dari musuh itu sudah diketahui pada umumnya.

Apakah ancaman dari luar itu merangsang sentralisasi kekuasaan dalam suatu kelompok ? Coser mengatakan bahwa hal itu tergantung pada sifat ancaman dari luar itu dan struktur internal kelompok itu sendiri. Kalau konflik itu menyebabkan perang (atau serangkaian fisik atau ancaman) dan kalau kelompok itu memiliki

pembagian kerja yang tinggi, maka sentralisasi kekuasaan mungkin naik. Hal ini tidak dapat dielakkan karena diperlukannya tindakan yang benar-benar terkoordinasi.

2. Konflik dan Solidaritas dalam Kelompok

Apakah konflik internal juga menguntungkan kelompok itu secara positif? jawaban Coser, ya. Seperti Simmel, Coser mengakui bahwa semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme tertentu, ketegangan, atau perasaan-perasaan negatif. Adanya ketegangan-ketegangan dan perasaan-perasaan negatif dalam *in-group* merupakan hasil dari keinginan individu-individu untuk meningkatkan kesejahteraannya, kekuasaannya, prestise-nya, dukungan sosialnya atau penghargaan-penghargaan lain. Ketegangan dalam semua hubungan sosial itu ada karena juga adanya perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan, tujuan pribadi, ketrampilan, kemampuan dan lain sebagainya.

3. Konflik Realistik Dan Non-Realistik

Coser membagi situasi konflik ke dalam dua hal yaitu: konflik yang realistik dengan konflik yang tidak realistik.

Konflik yang realistik “konflik ini berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan”. Contoh, para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen, sejauh manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji serta berbagai keuntungan bagi buruh.

Sedangkan konflik yang tidak realistik adalah konflik yang “bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak (Coser, 1959:49 dalam Margaret, 1979 terjemahan, 2004:110). Contoh : “orang-orang miskin sebagai penerima bantuan kesejahteraan sosial”. Hal tersebut adalah kejadian yang tidak sebenarnya, dan yang benar adalah sebagian besar pajak jatuh di tangan kaum kaya dalam bentuk subsidi atau secara tidak langsung dalam pemotongan pajak. Hal tersebut seolah-olah orang kaya tidak mendapat bantuan kesejahteraan, padahal mereka juga dapat tapi tidak secara langsung.

4. Permusuhan dalam Hubungan-Hubungan Sosial yang Intim

Menurut Coser ada kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistik tanpa sikap permusuhan atau agresif. Contoh, ada dua pengacara. Semasa masih menjadi mahasiswa fakultas hukum keduanya berteman dekat. Keduanya terlibat mewakili kliennya di pengadilan. Selama persidangan, masing-masing pengacara itu secara agresif melindungi kepentingan kliennya, tetapi setelah meninggalkan ruang sidang, kedua pengacara itu menjadi akrab dan melupakan perbedaan dan langsung pergi ke restoran untuk berbincang-bincang tentang masa lalu.

5. Konflik sebagai suatu stimulus untuk integrasi antar kelompok.

Sebagaimana disebutkan bahwa konflik dapat memperkuat batas antara kelompok dalam (*in-group*) dan kelompok luar (*out-group*). Konflik dapat juga meningkatkan usaha untuk menggalang solidaritas kelompok dalam (*in-group*) itu. Karenanya apabila konflik itu berlarut-larut, maka ikatan-ikatan sosial secara pelan-pelan dapat berkembang di antara pihak-pihak yang saling bertentangan itu. Salah satu ikatan itu adalah berupa norma-norma dan prosedur yang mengatur cara-cara berkonflik. Misalnya ada prosedur yang mengatur bagaimana cara-cara berunding antara buruh dengan pimpinan perusahaan.

Konflik juga bisa merangsang usaha untuk mengadakan persekutuan-persekutuan dengan kelompok-kelompok lain. Dalam beberapa hal, antagonisme antara kelompok-kelompok yang berlainan dapat diatasi kalau kelompok-kelompok ini bersatu dalam suatu koalisi untuk melawan musuh bersama.

3. Sintetis Teori Konflik Fungsional Dan Dialektik

Dahrendorf memandang kelompok-kelompok konflik sebagai konflik yang lahir dari kepentingan-kepentingan bersama para individu yang mampu berorganisasi. Ia menguraikan proses ini melalui perubahan kelompok semu menjadi kelompok kepentingan yang memberi dampak pada struktur. Lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari kepentingan-kepentingan itu sebagai jembatan dalam proses perubahan sosial terjadi. Berbagai usaha harus diarahkan untuk mengatur pertentangan-pertentangan sosial

melalui institusionalisasi yang efektif daripada melalui penekanan pertentangan itu.

Dahrendorf melalui teori konflik dia menunjukkan bagaimana organisasi-organisasi itu dapat dan benar-benar lahir dari pertentangan kelas. Sedangkan tujuan Coser yang utama adalah memperlihatkan fungsi positif dari konflik dalam meningkatkan integrasi sosial. Konflik antara kelompok dapat meningkatkan solidaritas internal dalam kelompok-kelompok yang berkonflik itu.

Coser mengajukan preposisi untuk menguji fungsionalitas konflik bagi kelompok sosial. Coser mencoba mengemukakan kondisi-kondisi positif terhadap konflik. Konflik dapat membantu mempertahankan struktur sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat menunjukkan batas-batas kelompok yang harus dipertahankan.

Selanjutnya konflik dapat menyatukan para anggota kelompok melalui pengukuhan kembali identitas kelompok. Apakah konflik merupakan sumber kohesi atau perpecahan kelompok, tergantung pada asal mula ketegangan, isu tentang konflik dan cara bagaimana ketegangan itu ditangani dan yang terpenting tipe struktur dimana konflik itu berkembang. Coser membedakan antara konflik *in-group* dan konflik *out-group*, antara konflik yang menghasilkan perubahan struktur lawan konflik yang disalurkan melalui institusi.

Teori konflik yang di bangun oleh Dahrendorf dengan teori fungsional konflik yang dibangun oleh Lewis Coser hampir ada kesamaan. Keduanya menyatakan bahwa teori konflik hanya merupakan teori parsial. Baik Dahrendorf maupun Lewis Coser dalam menganalisa struktur sosial, keduanya berpandangan bahwa konflik merupakan suatu fenomena yang harus diperhatikan. Teori parsial itu dapat terlihat dalam anggapan dasar tentang hakekat manusia, masyarakat dan arti penting teori sosiologi. Pandangan Dahrendorf (1968:58 dalam Sosiologi Kontemporer,2004:140) tentang manusia sebagai obyek pembahasan sosiologi bahwa semua orang yang dibahas oleh ilmu sosial merupakan makhluk abstrak yang artifisial.

Peranan merupakan konsep dasar dalam memahami manusia sosiologis. Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. Dahrendorf menyatakan bahwa

setiap peranan, sampai tingkat tertentu, membiarkan pelakunya tetap bebas dengan tidak menegaskan hal-hal tertentu. Masyarakat menolong membentuk perilaku manusia, akan tetapi manusia itu sampai tingkat tertentu sebaliknya membentuk masyarakat. Peranan seorang ayah misalnya, mencakup keharusan untuk memperhatikan dan sebagian harus bertanggungjawab atas kebutuhan emosional anak-anaknya. Akan tetapi bagaimana sebenarnya kebutuhan tersebut dipenuhi berbeda dari satu keluarga ke keluarga lain tanpa ada ketentuan atau larangan dari masyarakat. Tingkat kebebasan serta fleksibilitas itu dapat di amati dari pelaksanaan semua peranan yang kita miliki.

Dahrendorf dan Coser menyajikan suatu perspektif yang lebih umum dan tidak terbatas pada masyarakat tertentu. Dahrendorf membatasi analisisnya pada konflik antara tingkatan-tingkatan hierarki mengenai penyebaran kekuasaan dalam suatu asosiasi tertentu. Model ini cocok untuk menangani konflik dalam organisasi birokratis atau masyarakat-masyarakat yang diorganisir secara birokratis. Sedangkan Coser perhatian utamanya bukan untuk mengembangkan suatu teori komprehensif mengenai konflik, tetapi untuk memperlihatkan bahwa konflik dapat mempunyai fungsi positif untuk suatu kelompok atau masyarakat daripada hanya merusak solidaritas, khususnya kalau isu-isu konflik itu diakui dan dihadapi secara terbuka. Baik Dahrendorf dan Coser sama-sama menekankan analisisnya pada struktur sosial dan bukan pada antar individu.

C. Telaah Teori Fungsional Konflik Lewis A. Coser Dan Teori Konflik Dialektik Ralp Dahrendorf Sebagai Materi Dan Obyek Dalam Berdakwah

1. Masyarakat Islam

Pertama kali yang perlu dirumuskan adalah apa arti masyarakat? Kata masyarakat sinonimnya adalah sosial. Masyarakat berasal dari kata Arab “*syarikat*” artinya adalah kumpulan. Tetapi yang biasa digunakan dari kata Arab yaitu “*mujtama*” artinya kelompok manusia. Masyarakat menurut ilmu sosiologi adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. (Hasan Syadily, 1989:47).

Pengertian masyarakat yang menjadi titik poin adalah Pengaruh dan pertalian batin yang terjadi dengan sendirinya atau menjadi unsur *sine qua non* (yang harus ada) dalam masyarakat. Keberadaan masyarakat bukannya dengan menjumlahkan orang-orang yang masuk saja, di antara mereka harus ada pertalian satu sama lain.

Sedikitnya tiap anggota sadar akan adanya anggota lain, dan mau tidak mau ia memperhatikan adanya orang lain itu dalam tiap langkahnya. Kalau cara memperhatikan itu telah menjadi adat, tradisi atau lebih lagi menjadi lembaga, maka perhatian itu tetap dipelihara sekalipun tidak ada seseorang didekatnya. Umpamanya saja, karena memperhatikan adanya orang lain dan supaya berjalan tidak bentrokan dengan dia, maka orang berjalan di sebelah kiri jalan. Kalau perhatian itu telah menjadi peraturan atau adapt, maka orang akan tetap berjalan di sebelah kiri jalan sekalipun tidak tampak adanya orang lain yang datang dari jurusan sebaliknya. Contoh masyarakat kiranya dapat memberikan keterangan lebih jelas:

- a. Pada suatu tempat terdapat beberapa orang fakir, siang malam mereka hidup bersama menjalani kesengsaraan. Mereka tidur di atas tikar yang jelek, berpuasa dan hanya makan jika orang datang memberinya. Mereka ini hidup sendiri-sendiri dan tiada mengadakan hubungan satu sama lain. Kehidupan yang demikian itu tak dapat dinamakan masyarakat menurut definisi di atas.
- b. Ada lagi di tengah-tengah pegunungan terdapat suatu tempat di mana empat keluarga hidup berumah masing-masing. Walaupun satu rumah dengan rumah lainnya jaraknya berjauhan, tetapi anggota-anggota keluarga itu sering datang dan berkumpul. Seorang pandai mengaji dan pandai tentang soal agama, yang lain pandai membuat alat-alat rumah, seorang lagi pandai bercocok tanam, sedangkan yang keempat selalu bersedia untuk turun ke kota mengurus keperluan bersama. Dengan demikian mereka ini selalu butuh-membutuhkan dan juga pengaruh-mempengaruhi dalam tindakannya masing-masing dalam pergaulannya itu. Walaupun secara pengaruh-mempengaruhi amat terbatas dan rumahnya pun jauh letaknya satu sama lain, maka hidup mereka bersama itu memenuhi syarat masyarakat.

Masyarakat Islam adalah kelompok manusia yang hidup dan terciptanya kebudayaan Islam atas apa saja yang diamalkan oleh kelompok itu. Kelompok manusia yang mengamalkan kebudayaan Islam dengan sendirinya adalah mereka yang beragama Islam. Kenapa demikian? Kebudayaan Islam ialah pernyataan cara berfikir dan cara merasa bertakwa. Takwa adalah sikap yang dibentuk oleh agama, kebudayaan Islam adalah lanjutan dari agama Islam. Kebudayaan itu adalah cara hidup kelompok yang beragama Islam. Agama dan kebudayaan disatukan oleh syari'at dalam *ad-din*. Agama adalah syari'at dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan kebudayaan adalah syari'at hubungan manusia dengan manusia.

Orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya perkawinannya tidak berasaskan prinsip al-Qur'an dan Hadis, menghalalkan riba yang semua itu dilarang dalam ajaran Islam. Kebudayaan Islam ditegakkan di atas asas agama Islam. Tetapi ada juga mereka yang beragama Islam menjalankan kebudayaan bukan Islam yaitu hidup dalam kebudayaan barat. Misalnya saja mereka Islam, tetapi menjalankan konsep ekonomi kapitalism, atau mengatur kehidupan mereka sehari-hari disusun atas dasar hukum adat yang tidak sesuai dengan al-Qur'an. Kelompok yang demikian itulah yang diistilahkan dengan masyarakat orang Islam. Orang-orangnya Islam karena beragama atau mengakui Islam, tetapi masyarakatnya bukan Islami, karena kebudayaan yang diamalkan bukan Islam. Kebulatan atau integrasi kehidupan masyarakat ini terbelah nilai-nilai agamanya berlawanan dengan nilai-nilai kebudayaannya.

Tingkah laku Nabi Muhammad sepenuhnya diwarnai oleh al-Qur'an. Ajaran al-Qur'an diwujudkan oleh beliau berupa ucapan dan perbuatan dalam pergaulan sehari-hari dengan anggota-anggota masyarakat. Dari pergaulan itulah warga masyarakat mulai mengenal dan sedikit demi sedikit mereka menerima ajaran atau norma hukum yang ada dalam al-Qur'an walaupun banyak yang bertentangan dengan sistem nilai dan sikap hidup yang telah lama mereka anut. Dengan proses seperti ini yang berlangsung secara cepat, maka lahirlah sebuah masyarakat Islam Arab, yang patuh kepada hukum Tuhan dan meninggalkan sistem sosial mereka yang telah lama melembaga.

Islam diturunkan kepada masyarakat yang sudah wujud. Nabi Muhammad menyampaikan Islam kepada masyarakat jahiliyah. Sesudah itu Islam dibawa kepada masyarakat-masyarakat yang bertebaran dipermukaan bumi ini semenjak 14 abad yang lalu sampai sekarang. Terjadilah pengislaman, kepada tiap kali Islam memasuki suatu masyarakat. Dalam proses Islamisasi itu, yang pertama-tama sekali berlangsung ialah menggantikan agama masyarakat itu dengan agama Islam. Sesudah itu berlangsung pergantian atau penyelarasan budaya masyarakat dengan kebudayaan Islam. Dalam bidang social prose itu berlangsung dengan pergantian atau penyelarasan adat dengan prinsip-prinsip sosial Islam.

Pergantian atau penyelarasan adat dengan prinsip-prinsip sosial Islam sukar sekali, berjalan tidak lancar atau menghendaki waktu panjang. Adat yang mendarah daging membentuk tabiat, kesatuan tabiat membentuk kepribadian karena adat berakar dalam di lubuk kesadaran masyarakat, dibina beratus atau beribu tahun sebelum Islam datang, tidaklah mudah mengganti atau menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip baru, ia bertahan gigih.

Ketika pendukung adat dihadapkan dengan prinsip Islam maka mengalami ketidakbenaran suatu unsur adat, walau demikian tidaklah berarti adat itu ditinggalkan dengan menggantikannya dengan prinsip Islam, atau juga fikirannya mengakui, tapi perasaannya belum dapat menerima. Maka diusahakanlah memberi kulit Islam kepada adat itu, sehingga secara formal ia sudah dianggap sesuai dengan Islam, sekalipun isinya masih tetap berlawanan.

terhambatnya pergantian atau penyelarasan itu terkait dengan metode atau tata Islami dalam sejarah. Di nusantara dakwah diarahkan kepada mencapai jumlah pengislaman yang banyak, kurang meningkatkan mutu keislaman mereka yang mengaku beriman.

Pergantian dan penyelarasan itu menghendaki perjalanan waktu yang panjang, karena melenyapkan suatu unsur adat yang sudah lama, di samping menimbulkan unsur adat baru, menghendaki tekad kuat, ketekunan dan masa yang panjang.

Islamisasi suatu masyarakat berlangsung di dalam dua bidang : agama dan *social* budaya. Agama mesti diganti seluruhnya. Agama Islam dengan rukun iman dan rukun islam yang berbeda secara

asasi dengan agama lain. Karena itu orang yang masuk Islam mesti meninggalkan agama yang dianut sebelumnya dan menerima agama Islam secara menyeluruh tanpa kecuali.

Tentang sosial budaya tidak harus meninggalkan budaya sebelumnya, tetapi mengalihkan prinsipnya kepada iman islam, adat dan kebudayaan yang dilanjutkan dengan menyelaraskannya kepada prinsip-prinsip yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Hanya unsur-unsur yang tidak mungkin diselaraskan saja yang perlu ditinggalkan. Inilah yang dimaksud dengan pergantian dan penyesuaian kebudayaan Islam.

Pergantian atau penyesuaian ini membutuhkan waktu yang panjang. Kalau di dataran sosial mengalami kemandegan, maka kita temukan masyarakat yang hanya dalam agama mereka Islam, tetapi tidak dalam kebudayaan dan bisa jadi Islam hanya sebagai agama tapi tidak sebagai jalan hidup. Hanya dalam tata hubungan manusia dan Tuhan saja mereka mentaati perintah dan larangan, tetapi tidak dalam hubungan manusia dengan manusia. Masyarakat demikian diistilahkan masyarakat orang Islam.

2. Pola Cita Masyarakat Islam

Pembentukan pola cita dalam masyarakat Islam sangat berbeda dengan masyarakat bukan Islam. Pola cita masyarakat bukan Islam terbentuk berdasarkan pengalaman dan pemikiran sosial secara evolusi. Sedangkan pola cita masyarakat Islam diturunkan oleh Tuhan berupa wahyu dan terbentuk secara revolusi.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang masyarakat arab yang tidak teratur sebelum datangnya Islam. Dengan diangkatnya Muhammad sebagai nabi dan rasul masyarakat yang rusak sistem sosialnya dapat dirubah menjadi sebuah masyarakat yang teratur dalam waktu yang tidak lama, di mana mereka meninggalkan tingkah laku jahiliyah. Misalnya mereka tidak lagi meminum-minuman arak yang menjadi minuman favorit dan berjudi yang merupakan kebiasaan mereka yang telah berurat akar dalam tingkah laku sosialnya.

Hal itu terlihat pada sikap para sahabat nabi yang enggan meminum arak dan berjudi setelah turunnya ayat al-Qur'an yang secara tegas melarang kedua perbuatan itu dalam Surat al-Ma'idah :10.

3. Struktur Masyarakat Islam di Indonesia

Lapisan sosial adalah pembedaan masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (Soerjono Soekarno,1994:78). Dalam suatu masyarakat ada orang atau kelompok yang sangat di hormati atau bahkan tidak di hormati. Walaupun suatu Negara menentukan asas bahwa Negara mengakui asas persamaan derajat para warga Negara di depan hukum dan pemerintahan namun hal itu secara empiris tidak dapat di hindari atau di halangi.

Penghargaan terhadap sesuatu itulah yang menyebabkan timbulnya perbedaan kelas. Barang sesuatu yang di hargai di dalam suatu masyarakat itu mungkin berupa benda-benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin berupa kekuasaan, ilmu pengetahuan dan mungkin kesalehan dalam agama, siapapun yang memiliki yang berharga tadi dalam jumlah yang banyak, maka di anggap oleh masyarakat sebagai pihak yang menduduki lapisan paling tinggi.

Jika dalam masyarakat yang di hargai adalah alat-alat produksi, maka mereka yang menguasai alat-alat produksi akan menempati (tingkatan) atas dalam masyarakat.

Dalam masyarakat islam menurut konsepnya tidak mengakui lapisan sosial. Hal itu di dasarkan pada karakteristik sebagai berikut:

- a. umat islam sebgai umat yang satu (*ummatun wahidah*).
Artinya pada dasarnya sasaran manusia adalah satu yang diikat oleh kesamaan visi dan tujuan hidup berdasarkan akidah tauhid. Kesatuan yang diikat oleh akidah ini mengalahkan segala ikatan primordial yang ada.
- b. umat islam merupakan umat yang multiras, suku dan bangsa, artinya islam tidak membedakan ras,suku dan bangsa. Mereka diturunkan Allah untuk seluruh manusia dari bangsa dan golongan manapun.
- c. Umat islam menekankan kesamaan dan kesetaraan. Prinsip kesamaan dan kesetaraan di antara manusia untuk menghindari diskriminasi antar manusia.
- d. Umat islam yang mendorong tegaknya masyarakat dalam segala urusan islam. Islam mendorong lahirnya yang berdiri kokoh diatas nilai-nilai ilahiyah yang sesuai dengan budaya manusia.

- e. Umat islam yang mencintai keadilan. Ajaran islam menekankan terwujudnya keadilan di tengah masyarakat, tegaknya hukum dan komitmen terhadap ajaran islam.
- f. Umat islam menekankan persatuan dan kesamaan. Islam mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan yang di dasarkan pada kesamaan tauhid.
- g. Umat islam menekankan saling menghargai. Konsep persamaan yang terkandung dalam ajaran islam melahirkan sikap saling menghargai.(Ali Awar Yusuf,2002:36-42).

Karakteristik tersebut benar adanya, tetapi dalam aktualitas di dalam masyarakat terjadi pemaknaan yang terlalu luas secara alamiah, dimana dalam suatu masyarakat ada kelompok-kelompok yang paling di hormati dan ada yang biasa-biasa saja penghormatannya.

Struktur masyarakat orang Islam di Indonesia menempatkan orang-orang yang pandai atau mengetahui agama di kelompokkan dalam lapisan kiai. Kiai adalah sebutan khas orang yang di anggap mengetahui agama islam di Indonesia, hal ini ada di manapun. Sebutan ini biasanya pemberian masyarakat yang tidak bisa di peroleh dari lembaga manapun .

Ada juga yang menempati lapisan di atas kyai yaitu wali. Tetapi sebutan ini sulit di ketahui saat ini siapa saja yang dapat dikatagorikan wali karena beliau yang telah mencapai derajat wali tidak pernah mengakui dirinya wali. Masyarakat hanya menduga bahwa orang yang di berikan kelebihan dalam agama dan kemampuan diluar kemampuan manusia lain dianggap beliau sebagai wali.

Pada zaman dahulu terkenal di Indonesia wali Sembilan yang terbukti makamnya ada dan banyak diziarahi oleh masyakat muslim Indonesia. Selain bukti makam-makam juga banyak nilai-nilai sosial yang sampai sekarang sampai diikuti oleh masyarakat. Misalnya kalimat syahadat di Yogyakarta masih diperingati sekaten yang asli kata adalah *syabadat*.

Ada lagi kelompok santri,yaitu mereka adalah orang-orang yang terpelajar mereka dihormati berdasarkan ilmu pengetahuan yang di miliki dan bermanfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Masyarakat minta tolong para kaum santri untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang di hadapi.

Ada juga kelompok abangan. Mereka ini adalah masyarakat yang islam tetapi dari si pengetahuannya tentang islam masih awam. Masyarakat inilah yang biasanya menjadi obyek para kaum kyai untuk diajari berbagai macam hal tentang islam. Dengan harapan semakin bertambah ilmu mereka kehidupan agamanya tidak mengalami pasang surut.

Islam membagi lapisan sosial berdasarkan kaidah-kaidah yang dianutnya antara lain:

- a. lapisan sosial berdasarkan kepemilikan ekonomi
- b. lapisan sosial berdasarkan jenis kelamin
- c. lapisan sosial berdasarkan status sosial
- d. lapisan sosial berdasarkan keagamaan
- e. lapisan sosial berdasarkan kepemilikan ilmu pengetahuan. (ali Anwar Yusuf, 2002:65-68).

Umat Islam yang digambarkan dalam al-Qur'an sebagai *khairu ummah* (Q.S.Ali Imran:110) mempunyai tugas *amar ma'ruf* dan mencegah pada kemungkaran melalui berdakwah.

Teori-teori tersebut menggambarkan fakta masyarakat berdasarkan aliran naturalistik, dimana aliran yang dipakai oleh para ahli sosiologi itu mendiskripsikan hasil penelitiannya secara apa adanya. Hal ini sesuai dengan obyek kajian sosiologi adalah membahas tentang perilaku masyarakat.

Perilaku masyarakat ini bagi seorang pendakwah haruslah dilihat sebagai sebuah data yang menggambarkan bahwa masyarakat yang dihadapi adalah memang masyarakat yang penuh dengan konflik. Masyarakat yang penuh konflik ini oleh sosiologi tidak diberikan satu solusi untuk mampu menyelesaikannya diantara mereka. Memang ada orang lain yang bertugas untuk itu diantaranya adalah pengambil kebijakan dan tentu saja para pendakwah yang menyusupi pemikiran-pemikiran mereka pada kedamaian dan menghilangkan konflik-konflik antar mereka.

Bila diambil satu kesimpulan, bahwa konflik yang dijabarkan di sini bukanlah konflik konfrontasi atau peperangan antara mereka tetapi mereka mendasarkan pada kesetabilan masyarakat itu salah satu penyebabnya adalah adanya konflik di masyarakat.

Konflik mengandung muatan adanya fungsi-fungsi atau

posisi-posisi yang di perankan di dalam masyarakat dalam rangka untuk membuat sosial itu stabil. Posisi-posisi itu bisa di atas sebagai penguasa dan juga bisa di bawah sebagai bawahan. Hal ini tidaklah menjadi masalah sosial karena hal itu memang dikehendaki oleh semua komponen masyarakat dan bagi mereka hal itu legal.

Dalam Islam yang menjadi hal penting adalah adanya kerjasama antara orang-orang yang berada pada posisi atas sebagai pemimpin dan orang-orang bawah sebagai anggota masyarakat yang dipimpin. Perlu di upayakan supaya semuanya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemakmuran mereka sebagai kelompok dalam masyarakat, dan juga keberlakuan nilai-nilai *islamiy* dalam suatu masyarakat.

Masyarakat yang sedang mengalami konflik merupakan tantangan bagi para pendakwah untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang sedang menjangkit di dalam individu-individu.

Islam dalam menyelesaikan konflik lebih mengedepankan pada sisi ketenangan jiwa dan kesamaan pandangan tentang hidup sederhana dan persatuan. Para pendakwah lebih menekankan tujuan hidup dan bukan perlombaan menumpuk kekayaan dalam kehidupan, karena itu konflik merupakan suatu dinamikan yang bisa diselesaikan dengan kembali pada tujuan hidup, arti ketentraman, persatuan dan perdamaian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa antara Dahrendorf dan Coser terdapat materi untuk berdakwah bahwa keduanya :

1. sama-sama bersifat holistik, dimana sama-sama melihat masyarakat sebagai bagian yang terkait satu dengan lainnya, sehingga konflik merupakan dinamikan yang seluruh anggota masyarakat menginginkan penyelesaian, dan dakwah merupakan bagian dari penyelesaian.
2. keduanya cenderung untuk memusatkan perhatiannya pada variabel-variabel struktur sosial, sehingga dakwah dapat menyeru kepada komponen-komponen sosial untuk menjalankan fungsinya masing-masing di masyarakat tanpa harus hasad satu dengan lainnya.

3. keduanya mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula melahirkan konflik, maka konflik harus diselesaikan dengan kembali pada tujuan hidup bermasyarakat.

Sedangkan dari sisi teori, kedua teori tersebut sama-sama parsial. Menurut hemat penulis bahwa teori Dahrendorf merupakan dasar dari teori Coser dimana Coser melihat konflik tidak pada baik atau buruk, tetapi konflik justru mempunyai fungsi tersendiri dalam mempererat struktur sosial.

Dalam suatu masyarakat memang ada dua sisi yaitu sisi keteraturan dan sisi konflik dan yang memberikan fungsi tidak hanya pada sisi keteraturan tapi sisi konflik juga punya fungsi, maka pendapat Berghe yang mengatakan bahwa ada empat fungsi atas konflik :

1. Sebagai alat memelihara solidaritas
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi
4. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi. Sebelum konflik, kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.

Maka menurut hemat penulis bahwa selama masyarakat itu memiliki elemen-elemen yang terdiri dari individu, dan individu itu punya kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda, selama itu pula keteraturan dan konflik pasti akan selalu ada di masyarakat.

Sedangkan peranan teori-teori tersebut dalam aktifitas dakwah bagi umat Islam adalah sebagai pijakan yang mampu mempengaruhi materi dalam menyampaikan pesan dalam berdakwah dan sekaligus merupakan obyek kajian dalam berdakwah. Karena demikian adanya bahwa teori-teori yang dihasilkan tersebut merupakan fakta sosial yang ada dan selalu berkembang di masyarakat. Pendakwah tanpa mengetahui teori-teori sosial ini akan seperti orang buta mau berjalan, tentu saja ketika ia buta dengan fakta sosial dan ia berdakwah pada suatu tempat yang kondisinya seperti yang dihasilkan dari penelitian

tersebut, maka dakwah dia bisa gagal dan bisa jadi menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.

Dakwah dalam teori konflik fungsional dan konflik dialektik merupakan dua teori yang sama-sama menekankan pada obyek bahwa dalam suatu masyarakat terdapat konflik. Peranan teori-teori tersebut dalam aktifitas dakwah bagi umat Islam adalah sebagai pijakan yang mampu mempengaruhi materi dalam menyampaikan pesan dalam berdakwah dan sekaligus merupakan obyek kajian dalam berdakwah. Materi dakwah di daerah dalam kondisi konflik lebih menekankan pengaktifan fungsi-fungsi sosial sehingga konflik bisa selesai, sedangkan masyarakat yang sedang konflik perlu pemahaman-pemahaman tentang kebersamaan, ketentraman dan perdamaian, sehingga obyek kajian yang selalu disampaikan lebih menekankan hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- _____, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.
- Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Doyle Paul Johnson, 1981, *Sociological Theory Classical Founders And Contemporary Perspective*, Terjemahan Robert M.Z. Lawang, Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- George Ritzer, 1980, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, Terjemahan Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Jaworski, Gary Dean, 1991, *The Historical And Contemporary Importance Of Coser's Functions*, *Sociological Theory* 116-123.
- George Ritzer, Douglas j. Goodman, 2003, *Modern Sociological Theory*, terjemahan, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Lewis Coser, *The Function Of Social Conflict*, New York Press, 1956. Margaret M. Poloma, 2004, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Beilharz, *Social Theory : A Guide To Central Thinkers*, terjemah Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2002.
- Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori Dan Metodologi*, Yogyakarta: Cired, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1978.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.